

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat yang berlatar belakang pendidikan syari'ah merupakan sesuatu hal yang baru dalam perjalanan profesi Advokat di Indonesia, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Syari'ah mendapatkan legalitas formal pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat¹, dalam penjelasan pasal tersebut diperjelas maksud latar belakang pendidikan tinggi hukum yaitu lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syari'ah, Perguruan Tinggi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Sarjana Hukum Islam (SHI)², Sarjana Syariah (S.Sy)³ dan mulai Agustus 2016 berganti menjadi Sarjana Hukum (SH), perubahan gelar dari SHI/S.Sy menjadi SH memiliki makna yang dalam perspektif politik hukum dapat dipetakan ke dalam politik perumusan hukum (*legal formulation politic*), politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum (*enactment policy*).

Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon kedudukan dan posisinya setara dengan Advokat lulusan non PTKIN dalam profesi Advokat, di samping merupakan hasil perjuangan wakil-wakil rakyat, di sisi lain justru

¹ Dalam perkembangan pembahasan RUU Advokat banyak sekali masukan dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan dalam produk hukum yang akan disahkan menempatkan posisi lulusan fakultas syariah pada posisi lebih rendah dibandingkan lulusan fakultas hukum. Lulusan fakultas hukum dapat beracara di seluruh pengadilan, sementara lulusan fakultas syariah hanya dibolehkan beracara di Pengadilan Agama, dalam Pasal 2 ayat (1) RUU Advokat dinyatakan bahwa "Yang dapat diangkat menjadi Advokat adalah sarjana hukum yang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undnag-undang ini. Sementara Pasal 3 ayat (4) menyebutkan "sarjana syariah dapat diangkat menjadi Advokat di Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan". Abdul Gofar, "Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum", Jurnal Mimbar Hukum Nomor 61, Tahun 2003, hal. 12.

² Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: E/10/ Tahun 2002 Tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam.

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama

inilah awal dari perjuangan kaum muslim Indonesia, undang-undang sudah memberi kesempatan kepada Advokat lulusan PTKIN tanpa diskriminatif untuk menjadi Advokat, pertanyaan kita adalah mampukah diberikan hak yang sama menjawab semua tantangan ini dan sekaligus memiliki *comperative advantage* (daya saing yang handal) terhadap sarjana lain non PTKIN yang berpendidikan tinggi hukum⁴.

Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki muatan nilai tersendiri dibandingkan dengan Advokat lulusan non PTKIN. hal ini sekaligus merupakan kelebihan lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dibandingkan dengan Advokat lulusan non PTKIN dalam proses mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kelebihan yang melekat ini sekaligus juga menjadi tanggung jawab secara individu, komunitas dan organisasi.

Secara *de jure* Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menggeluti dunia kerja di bidang profesi Advokat, namun secara *de facto*, peluang yang diberikan oleh undang-undang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikannya sebagai ladang pencaharian kehidupan karena

Lulusan jurusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya terpaku untuk menjadi *lebe* atau penghulu yang biasanya banyak kalangan masyarakat yang beranggapan demikian, tetapi alumni lulusan Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga/Akhwal Syaksyah yang ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang Advokat dimasa mendatang, semakin terbuka lebar adapun gelar yang diberikan untuk lulusan Hukum Keluarga/Akhwal Syaksyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tentang Gelar Akademik Peguruan Tinggi Keagamaa menjadi Sarjana Hukum (SH).

Predikat agamis yang melekat pada Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon terkandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi peran amaliah dalam membangun peradaban bangsa, terutama yang

⁴Eman Sulaiman.2003."Advokat Syari'ah Peluang dan Tantangannya,"makalah disampaikan pada Workshop Calon Advokat Sarjana Suari'ah se-Jawa-Bali-Nusa Tenggara Kerjasama DPP APSI, Ditpertaids Depag dan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Hotel Bandungan Indah Kabupaten Semarang, 9 September 2003

menjatuhkan pilihannya dalam penegakan hukum lebih khusus lagi yang telah, sedang dan akan berkecimpung dalam profesi Advokat di tengah kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukum yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran Advokat lulusan PTKIN dapat menampilkan alternatif baru dan Advokat hukum lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menulis skripsi dengan tema **“EKSISTENSI ADVOKAT LULUSAN AKHWAL SYAKSIYAH IAIN SYEKH NURJATI DALAM MENDAMPINGI KLIEN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A KABUPATEN CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil rumusan masalah berupa :
 - a. Wilayah Kajian
 Wilayah kajian dalam proposal ini ialah peneliti akan meninjau langsung eksistensi Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.
 - b. Jenis Masalah
 - 1) Minimnya lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati yang melanjutkan menjadi Advokat mayoritas di dominasi oleh lulusan Sarjana Hukum Perguruan Tinggi non PTKIN
 - 2) Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa alumni jurusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya bisa menjadi penghulu
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah meligitimasi sehingga Advokat lulusan PTKIN diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan fakultas hukum, dalam mendampingi Klien

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini agar lebih terarah dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, untuk itu penelitian ini dibatasi hanya beberapa Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana prinsip pengaturan Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A?
- b) Bagaimana peluang Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A?
- c) Bagaimana eksistensi dan problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui prinsip pengaturan Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A
- b) Untuk mengetahui peluang Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A.
- c) Untuk mengetahui eksistensi dan problemnya Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis: sebagai bentuk *ikhtiyar* dalam mengembangkan *khazanah* keilmuan baik peneliti maupun mahasiswa Akhwal Syaksyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Praktis: untuk mengetahui prinsip pengaturan Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, peluang Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, eksistensi dan problemnya Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A.

D. Penelitian Terdahulu

1. Zainuddin, Muslim *“Peluang Dan Tantangan Sarjana Syariah Dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar*

Telah diperoleh dalam penelitian ini beberapa faktor yang menyebabkan minimnya Advokat lulusan Sarjana Syari’ah. Faktor yang menyebabkan kurangnya lulusan Sarjana Syariah memasuki profesi syari’ah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pribadinya, sementara faktor eksternal disebabkan oleh karena adanya faktor lain di luar pribadi. Adapun yang menjadi faktor internal adalah tidak berani melaksanakan sumpah profesi Advokat yang diwajibkan oleh undang-undang Advokat dan tidak menerima celaan terhadap dirinya karena membela orang-orang yang salah, seperti melakukan pencabulan, pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya. Sedangkan faktor eksternal sarjana syariah tersebut dikarenakan kurikulum yang tersedia di Fakultas Syariah kurang mendukung profesi syariah, kurangnya koordinasi Fakultas Syariah dengan lembaga-lembaga lain, kurangnya *financial* bagi dirinya sendiri karena pendapatannya yang tidak menentu, mindset masyarakat yang menyatakan bahwa profesi satu-satunya adalah Pegawai Negeri Sipil dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kepada semua kalangan⁵.

2. Yasin, Mohamad Nur *“Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah,”*

Telah diperoleh dalam penelitian ini politik hukum pemberlakuan gelar Sarjana Hukum (S.H) untuk alumni Jurusan HBS (*Muamalah*) Fakultas Syari’ah mencakup politik perumusan hukum, substansi hukum, dan pemberlakuan hukum.

- a. Politik perumusan hukum untuk mewujudkan gelar SH bagi alumni Fakultas Syari’ah berlangsung lama dan melelahkan, menghasilkan rumusan final perlunya gelar S.H untuk alumni Fakultas Syari’ah yang

⁵ Muslim Zainuddin *“Peluang Dan Tantangan Sarjana Syariah Dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar 1:1 (April 2016) : 1-17*

tertuang dalam PMA Nomor 33 tahun 2016 tentang Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

- b. Politik substansi hukum pemberlakuan gelar SH untuk alumni Jurusan HBS (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah adalah *empowering* dan implementasi semangat integrasi dan interkoneksi keilmuan serta dalam rangka mendistorsi dikotomi kelembagaan.
- c. Politik pemberlakuan hukum (*enactment policy*) menunjukkan masih adanya sejumlah pengelola S2 ilmu hukum dan S2 kenotariatan serta *stakeholders* yang belum memahami esensi gelar S.H untuk alumni Jurusan HBS (*Muamalah*) jika para pengelola S2 ilmu hukum dan S2 kenotariatan serta *stakeholders* hukum meliputi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Asosiasi Notaris Indonesia mengetahui adanya kualitas keilmuan syari'ah dan kualitas keilmuan hukum konvensional pada diri alumni Fakultas Syari'ah dan memberi kesempatan kepada alumni tersebut untuk berkarir di dunia hukum, maka pergantian gelar dari SHI/S.Sy menjadi SH bisa secara total menyelesaikan problem yuridis yang selama ini dibebankan kepada alumni Jurusan HBS (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah. Namun, jika sebaliknya, maka pergantian gelar dari S.H.I/S.Sy menjadi S.H tidak otomatis memberikan side efek positif apapun kepada alumni Jurusan HBS (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah⁶.

3. Aliah, Khairun Inayah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sunggumina Kelas 1B,*”

Telah diperoleh dalam penelitian ini mekanisme atau tata cara seorang Advokat dalam mendampingi Klien dalam perkara perdata yaitu ada tiga tahapan penting yang seharusnya dilakukan oleh seorang Advokat:

- 1) Proses Konsultasi,
- 2) Upaya mencari alternative penyelesaian sengketa dan,

⁶ Mohamad Nur Yasin “Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah,” Jurnal Hukum dan Syariah 7:2 (2016): 1-22.

3) Proses hukum (litigasi)⁷.

4. Yusdani “ *Posisi Tawar Sarjana Syari’ah Menurut UU Advokat*”

Telah diperoleh dalam penelitian ini Tantangan yang dihadapi oleh sarjana Syari’ah untuk memasuki dunia profesi Advokat tidaklah ringan, tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah:

- a. Faktor internal, kelemahan internal yang dihadapi oleh sarjana Syari’ah, terutama terletak pada minimnya alumni Akhwal Syaksiyah yang berprofesi Advokat, padahal, modal utama menjadi Advokat sebetulnya hanya terletak pada kemauan dan keberanian, sementara pengetahuan hukum dan teknis beracara dapat dipelajari secara autodidak dan pengalaman praktek di lapangan hal penting lainnya yang termasuk tantangan/kelemahan internal adalah terletak pada pendidikan tinggi syari’ah, yakni pada aspek kurikulum. Perlu ada reformulasi kurikulum Fakultas Syari’ah dengan beberapa acuan pokok sebagai berikut:
 - 1) Nomenklatur Fakultas Syari’ah dan jurusan/program studi perlu diganti dengan istilah yang lebih populis.
 - 2) Tujuan dan indikator kompetensi lulusan dari kurikulum tersebut hendaknya diarahkan pada penyiapan sarjana yang siap bekerja di lembaga-lembaga hukum, termasuk menjadi Advokat, yang dalam dataran teknis dan praktisnya dengan cara menambah mata kuliahmata kuliah ilmu hukum dan kemahiran hukum.
- b. Faktor Eksternal, yakni kurangnya tingkat apresiasi terhadap ilmu syari’ah sebagai ilmu hukum terutama dari kalangan ahli dan praktisi hukum dan tantangan ini mendesak untuk dijawab oleh ilmuwan syari’ah dalam tataran konsep teoritis dan oleh Advokat syari’ah dalam penegakan hukum di pengadilan⁸.

5. Munawwar, Atful “*Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*”,

⁷ Khairun Inayah Aliah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien di Pengadilan Agama Sunggumina kelas 1B,*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 68.

⁸ Yusdani “ *Posisi Tawar Sarjana Syari’ah Menurut UU Advokat*” Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004 12:11.

Dalam penelitian ini peneliti skripsi mengungkapkan dua hal kode etik Advokat, yaitu bahwa kode etik Advokat mengandung nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi Advokat, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran, dan nilai-nilai kode etik Advokat ditinjau secara hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam⁹.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa penelitian yang berjudul **“Eksistensi Advokat Lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Dalam Mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon”**, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Akhwal Syaksyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon didirikan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat akan pendidikan tinggi hukum Islam yang mampu member bekal pengetahuan hukum Islam, terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan keperdataan Islam dan khususnya lagi hukum-hukum keluarga Islam kepada para calon sarjana hukum Islam, sehingga mereka mampu menerapkan dan mengembangkan keilmuan mereka di tengah masyarakat. Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Akhwal Syaksyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertujuan mencetak lulusan yang profesional yang berwawasan luas sehingga mampu memberi solusi terhadap problem hukum yang dihadapi masyarakat, adapun gelar yang diberikan untuk lulusan Hukum Keluarga Akhwal Syaksyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI No. E/10/Th 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk Hukum Keluarga Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat dengan (S.H.I)¹⁰ dan mulai 9 Agustus 2016 berganti menjadi Sarjana Hukum (S.H)¹¹.

⁹ Atful Munawwar *“Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), 55.

¹⁰ <http://web.syekhnurjati.ac.id/as/profil-jurusan/sejarah-pendirian/>

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tentang Gelar Akademik Peguruan Tinggi Keagamaan.

Perubahan gelar dari S.H.I/S.Sy menjadi S.H memiliki makna yang dalam perspektif politik hukum dapat dipetakan ke dalam politik perumusan hukum (*legal formulation politic*), politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum (*enactment policy*). Politik hukum pemberlakuan gelar akademik dari S.H.I/S.Sy menjadi S.H tidak lepas dari pengaruh dunia pasar kerja dan profesi berbasis hukum, yaitu Jaksa, Hakim, Panitera, Notaris, dan Advokat.

Syarat kesarjanaaan untuk bisa mengikuti rekrutmen berbagai profesi hukum tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

1. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No 16 Th 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, syarat untuk menjadi Jaksa adalah Sarjana Hukum.
2. Syarat kesarjanaaan menjadi Hakim dan Panitera pada Peradilan Umum adalah Sarjana Hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat (1) poin (f) dan pasal 29 poin (b) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Pasal 3 poin (e) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris harus berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
4. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Makna kata “sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” bisa dicermati pada penjelasan UU Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syari’ah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Pada perspektif kajian hukum normatif dapat dinyatakan bahwa dalam uraian di atas terdapat isu hukum berupa inkonsistensi hukum (*inconsistency of*

norm) dan pertentangan hukum (*conflict of norm*) dalam norma rekrutmen calon penegak hukum di Indonesia, *Inconsistention of norm* tercermin dari tidak adanya penjelasan tentang cakupan dan makna “Sarjana Hukum” dalam UU Kejaksaan, UU Peradilan Umum, dan UU Jabatan Notaris di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, terdapat penjelasan yang konkrit dan detail tentang cakupan dan makna “sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” dalam Undang-undang Tentang Advokat.

Adapun *conflict of norm* tergambar dari tidak adanya pengakomodasian dan penyerapan terhadap potensi alumni Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syari’ah oleh Undang-undang Tentang Kejaksaan, Undang-undang Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, padahal Undang-undang Tentang Advokat dengan tegas mengakomodasi dan menyerap potensi alumni Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syari’ah. *Inconsistention of norm* dan *conflict of norm* ini memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat khususnya di kalangan alumni Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syari’ah se-Indonesia, meskipun alumni Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syari’ah sudah mempelajari hukum Islam dan hukum umum, keberadaan mereka belum terakomodasi secara maksimal ke dalam substansi hukum nasional yang mengatur rekrutmen jaksa, hakim dan panitera peradilan umum, serta notaris inilah yang mengakibatkan pandangan masyarakat mengatakan alumni Akhwal Syaksyah hanya bisa melanjutkan karirnya menjadi seorang *lebe* atau penghulu .

Adanya *inconsistention of norm* dan *conflict of norm* dalam norma rekrutmen penegak hukum yang kemudian memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat ini tidak searah dengan semangat keadilan, tidak adanya keadilan dan tidak adanya pengakomodasian terhadap realitas lokal, dalam konteks ini direpresentasikan oleh eksistensi alumni Jurusan Akhwal Syaksyah Fakultas Syari’ah, yang telah lama hidup dan tumbuh di tengah masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan negara (Undang-undang Tentang Kejaksaan, Undang-undang Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Tentang Notaris) bisa dikategorikan serumpun dengan fenomena yang oleh Ann Elizabeth Mayer disebut sebagai problem dasar pengakomodasian hukum.

Menurut Ann Elizabeth Mayer, masalah dasar pengkodifikasian hukum Islam di negara Islam adalah munculnya konflik antara sumber hukum yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat dengan hasil kodifikasi hukum Islam yang diundangkan di negara tersebut. Problem dasar yang sering muncul adalah tidak terakomodasinya praktek yang telah mengakar di masyarakat ke dalam kodifikasi hukum nasional¹².

Menurut rekomendasi forum Dekan Syari'ah dan Asosiasi Dosen Syari'ah Indonesia, penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama, baik negeri maupun swasta yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tidak menguntungkan Fakultas Syari'ah dan alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah, ada beberapa sebab tentang hal ini.

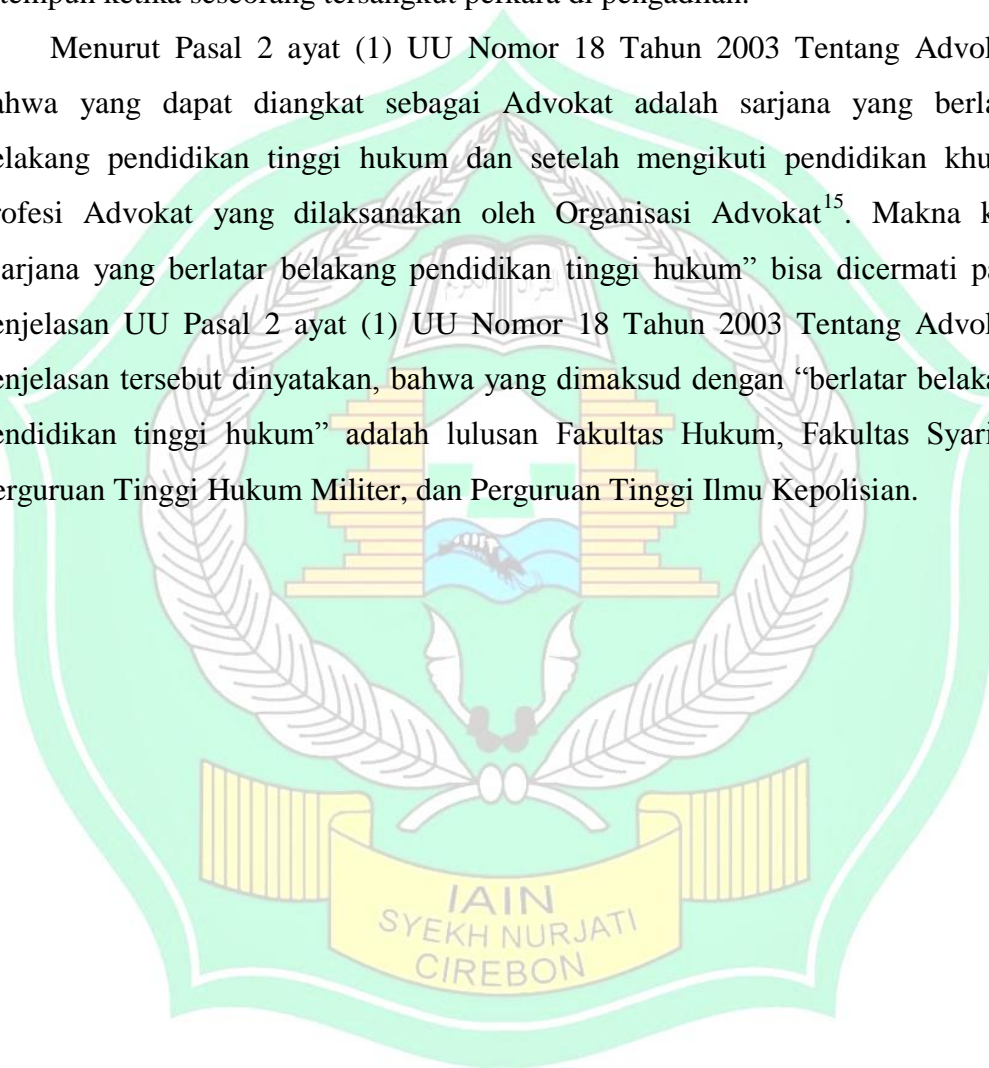
- a. Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) yang mulai direspon dan dikenal masyarakat pengguna lulusan diganti dengan gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) yang belum dikenali sama sekali oleh masyarakat pengguna lulusan. Gelar S.Sy menunjukkan istilah yang semakin abstrak di tengah masyarakat.
- b. Gelar S.H.I lebih dapat diterima untuk melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum dibanding gelar S.Sy.
- c. Gelar S.Sy kurang menunjukkan kompetensi spesifik di bidang disiplin keilmuan hukum, mengingat ontologi Fakultas Syari'ah mengandung makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada permasalahan hukum, melainkan juga masalah *aqidah* dan *akhlak*.
- d. Untuk mensosialisasikan gelar baru yang abstrak membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sederhana. Mengacu pada empat pemikiran di atas cepat atau lambat PMA RI No 36 Tahun 2009 tentang pembidangan ilmu dan gelar akademik potensial berdampak secara langsung terhadap menurunnya daya saing mahasiswa Fakultas Syari'ah baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional¹³.

¹² Ann Elizabeth Mayer, "*The Syariah: a Methodology or a Body of Substantive Rules*", in *Nicholas Heer, Islamic Law and Jurisprudence* Seattle and London: University of Washington Press, (September 1990), 198.

¹³ Hasil Rekomendasi Pertemuan Forum Dekan/ Jurusan Syariah dan Forum Asosiasi Dosen Syariah Indonesia Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu, 22 Oktober 2014,

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual¹⁴, sedangkan eksistensi Advokat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik diluar persidangan maupun pada forum pengadilan: yaitu dapat di katakan sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat¹⁵. Makna kata “sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” bisa dicermati pada penjelasan UU Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, penjelasan tersebut dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

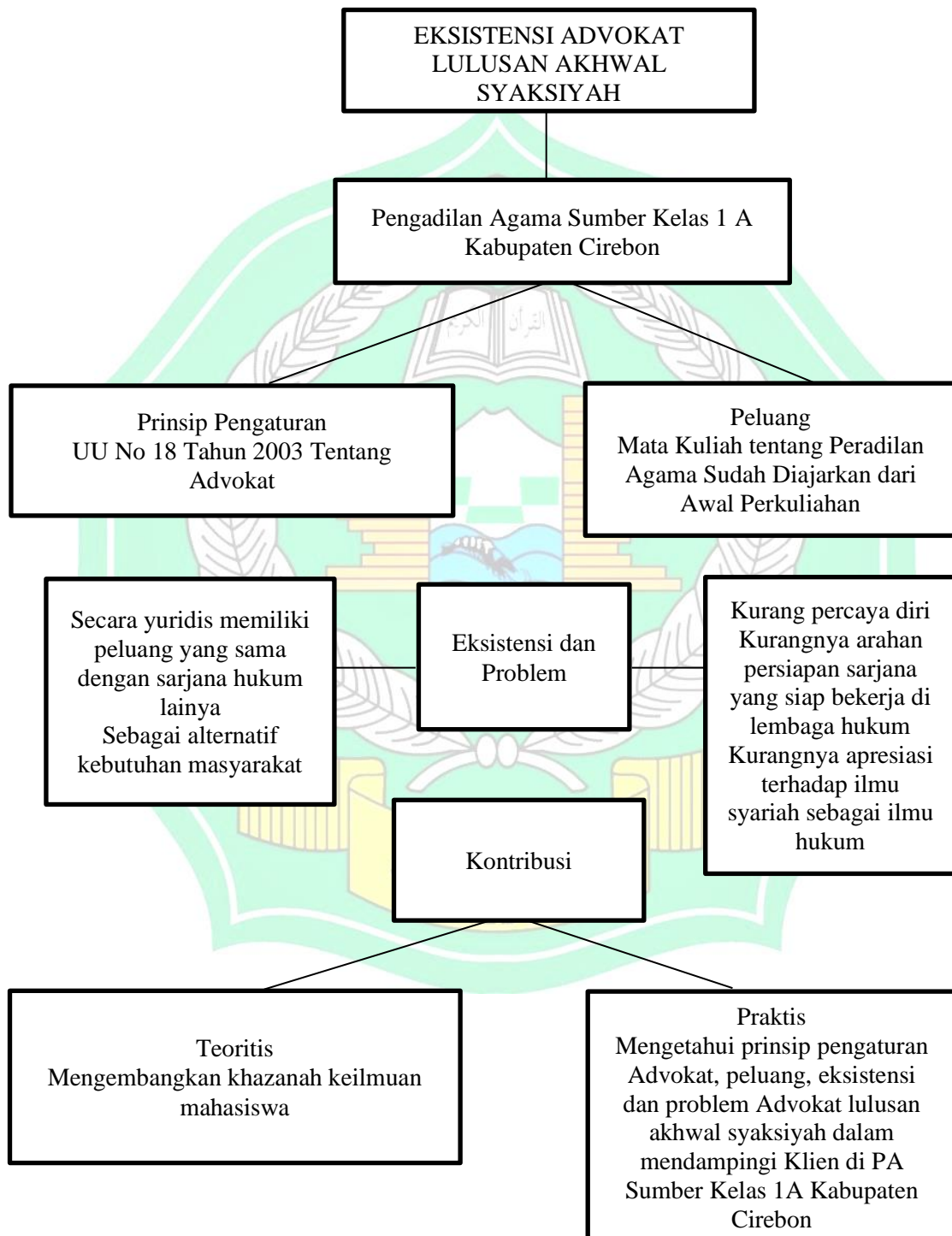


syariah.uin-malang.ac.id/Hasil-Rekomendasi-Pertemuan-Forum-Dekan Syariah, diakses 27 Novemver 2016.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. (Juni 1997) : 253.

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

1.1 Tabel Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan, apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁶.

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: menggambarkan dan mengungkap (*to describe dan explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe dan explain*)¹⁷.

¹⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 96.

Maka, penelitian kualitatif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis juga natural mengenai “Eksistensi Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan observasi partisipatoris, adapun metodologi penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif¹⁸. Hal ini dimaksud untuk mengetahui prinsip pengaturan, peluang, eksistensi dan problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber 1A Kabupaten Cirebon.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh Tafsir al-Qur'an tentang ayat penegakkan hukum, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, dan dari kesimpulan alumni jurusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang terjun di dunia Advokat yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui prinsip pengaturan, peluang, eksistensi dan

¹⁸ Pendekatan yang ditujukan untuk meneliti pada hasil wawancara mendalam (*deep interview*), kemudian menganalisis hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon, disisi lain data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, peneliti memfokuskan pada Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya bisa mewawancarai sebanyak 2 orang Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, selain itu sebagai data sekunder, peneliti akan melakukan data pendukung seperti mewawancarai informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui prinsip pengaturan, peluang, eksistensi dan problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana prinsip pengaturan, peluang, eksistensi dan problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, wawancara ini dilakukan dengan Advokat lulusan jurusan Akhwal Syaksyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mendapat data prinsip pengaturan, peluang, eksistensi dan

problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon, wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.

b. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian, adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

- a. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan alumni Akhwal Syaksiyah yang berprofesi sebagai Advokat serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:
 - 1) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan alumni Akhwal Syaksiyah yang

berprofesi sebagai Advokat serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.

- 2) Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Advokat lulusan jurusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Mengklarifikasi data yang diperoleh dari Advokat lulusan jurusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan sistematis mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : PENDAMPINGAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN

Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup tinjauan profesi Advokat, kode etik Advokat, gelar akademik, banyak dituangkan disini secara definitif.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang peluang lulusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sekilas objek penelitian, profil informan, pandangan Advokat lulusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV : EKSISTENSI ADVOKAT LULUSAN AKHWAL SYAKSIYAH IAIN SYEKH NURJATI DALAM MENDAMPINGI KLIEN DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1 A KABUPATEN CIREBON.

Bab ini membahas tentang prinsip pengaturan Advokat dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, peluang Advokat lulusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, eksistensi dan problematika Advokat lulusan Akhwal Syaksiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

